

Dinamika Permukiman Kumuh di Kota Palembang dalam Perspektif Sosial dan Ekonomi

Mirna Delli Septiana^{1*}, Ernia Syah Putri², Suhardi³, Rudy Kurniawan⁴, Suci Wahyu Fajriani⁵, Lisy Septiani Putri⁶

^{1,2,3,4,5,6}Program Studi Sosiologi, Universitas Sriwijaya
Email: mirnadelliseptiana31@gmail.com^{1*}

Abstrak

Permukiman kumuh merupakan salah satu permasalahan perkotaan yang masih banyak di temukan di berbagai kota besar Indonesia, termasuk Kota Palembang. Kondisi permukiman kumuh ini biasanya ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi, kondisi lingkungan yang kurang layak, serta keterbatasan akses terhadap fasilitas dasar seperti sanitasi dan air bersih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika permukiman kumuh di kota Palembang dari perspektif sosial dan ekonomi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah literature review dengan pendekatan deskriptif analitik. Data diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti jurnal ilmiah, buku, dan laporan penelitian yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa munculnya permukiman kumuh dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pertumbuhan penduduk yang tinggi, urbanisasi, keterbatasan lapangan pekerjaan, serta rendahnya tingkat pendapatan masyarakat. Selain itu, kondisi sosial masyarakat juga turut mempengaruhi terbentuknya kawasan permukiman kumuh. Oleh karena itu, penanganan permukiman kumuh memerlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat melalui kebijakan pembangunan perkotaan yang lebih merata serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Keywords: Kemiskinan perkotaan, Permukiman kumuh, Sosial ekonomi, Urbanisasi

PENDAHULUAN

Perkembangan kota yang pesat merupakan salah satu dampak dari meningkatnya jumlah penduduk dan proses urbanisasi yang terus berlangsung. Urbanisasi mendorong perpindahan penduduk dari wilayah pedesaan ke wilayah perkotaan dengan tujuan memperoleh kesempatan kerja, pendidikan, serta akses terhadap fasilitas yang lebih baik. Namun, pertumbuhan penduduk perkotaan yang tidak diimbangi dengan perencanaan tata ruang yang baik dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan lingkungan, salah satunya adalah munculnya kawasan permukiman kumuh. Permukiman kumuh merupakan kawasan hunian yang berkembang secara tidak

terencana dan umumnya memiliki kondisi lingkungan yang kurang layak. Ciri-ciri kawasan ini antara lain kepadatan bangunan yang tinggi, kualitas bangunan yang rendah, keterbatasan sarana dan prasarana dasar, serta kondisi sanitasi lingkungan yang kurang baik. Selain itu, kawasan permukiman kumuh seringkali berada di lokasi yang rentan terhadap berbagai risiko lingkungan seperti banjir, pencemaran air, serta masalah kesehatan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permukiman kumuh tidak hanya menjadi masalah fisik lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Permasalahan permukiman kumuh umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti

pertumbuhan penduduk yang cepat, keterbatasan lahan permukiman yang layak, serta rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat dalam memperoleh hunian yang memadai.

Masyarakat dengan pendapatan rendah seringkali memilih tinggal di kawasan dengan biaya hunian yang murah meskipun kondisi lingkungannya kurang layak. Hal ini menyebabkan terbentuknya kawasan permukiman dengan kepadatan tinggi dan fasilitas yang terbatas. Di Indonesia, permasalahan permukiman kumuh masih menjadi tantangan dalam pembangunan perkotaan. Pertumbuhan kota yang cepat seringkali tidak diikuti dengan penyediaan infrastruktur yang memadai, sehingga memicu berkembangnya kawasan hunian yang tidak terencana. Kondisi tersebut dapat terlihat dari keterbatasan akses terhadap air bersih, sistem sanitasi yang kurang baik, serta pengelolaan sampah yang tidak optimal di beberapa kawasan permukiman perkotaan (Rahman et al., 2025).

Kota Palembang sebagai salah satu kota besar di Indonesia juga menghadapi permasalahan permukiman kumuh. Berdasarkan kebijakan pemerintah daerah, beberapa wilayah di kota ini telah dikategorikan sebagai kawasan kumuh dengan tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kondisi lingkungan yang kurang memadai. Permasalahan yang sering ditemukan meliputi keterbatasan sarana sanitasi, pengelolaan limbah rumah tangga yang kurang baik, serta sistem drainase yang tidak optimal (Nuradinda et al., 2021). Selain itu, pesatnya pertumbuhan penduduk perkotaan juga

berkontribusi terhadap peningkatan jumlah kawasan permukiman kumuh. Masyarakat yang datang ke kota untuk mencari pekerjaan seringkali tidak memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk memperoleh hunian yang layak. Akibatnya, mereka memilih tinggal di kawasan yang memiliki biaya sewa rendah, seperti daerah bantaran sungai atau lahan kosong yang tidak dikelola dengan baik (Sukmaniar et al., 2026).

Kondisi lingkungan permukiman kumuh yang kurang memadai dapat berdampak terhadap kualitas hidup masyarakat. Lingkungan yang padat dan tidak memiliki sistem sanitasi yang baik dapat meningkatkan risiko munculnya berbagai penyakit berbasis lingkungan, seperti diare, demam berdarah, dan infeksi saluran pernapasan. Selain itu, keterbatasan infrastruktur seperti jalan, drainase, dan pengelolaan sampah juga dapat memperburuk kondisi lingkungan dan kesehatan masyarakat di kawasan tersebut. Dalam upaya mengatasi permasalahan permukiman kumuh, diperlukan upaya identifikasi dan pemetaan kawasan secara sistematis. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah pemanfaatan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) atau Geographic Information System (GIS). Teknologi ini memungkinkan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data spasial sehingga dapat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi lokasi kawasan kumuh serta memahami karakteristik permasalahan yang terjadi di setiap wilayah (Rahman et al., 2025).

Melalui pemanfaatan teknologi tersebut, proses perencanaan dan penanganan

kawasan permukiman kumuh dapat dilakukan secara lebih terarah dan efektif. Informasi spasial yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan perkotaan, khususnya dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, penyediaan infrastruktur dasar, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian mengenai pemetaan dan analisis kawasan permukiman kumuh menjadi penting untuk mendukung perencanaan pembangunan kota yang lebih berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode literature review untuk menganalisis dinamika permukiman kumuh di Kota Palembang dalam perspektif sosial dan ekonomi berdasarkan berbagai hasil penelitian sebelumnya. Metode ini digunakan untuk mengkaji teori, konsep, serta temuan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kondisi permukiman kumuh, faktor sosial, dan aspek ekonomi masyarakat perkotaan. Melalui literature review, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai fenomena permukiman kumuh dari berbagai sumber ilmiah (Creswell et al., 2018). Rancangan penelitian dilakukan dengan menelusuri, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada kajian literatur yang membahas permukiman kumuh, kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta dinamika perkembangan kawasan permukiman kumuh di wilayah perkotaan. Sumber data yang digunakan merupakan data

sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dan artikel penelitian yang dipublikasikan dalam rentang waktu 2021–2025.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai artikel jurnal, buku, serta sumber ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Literatur yang telah diperoleh kemudian dipilih berdasarkan kesesuaian dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan dengan cara membaca, mengelompokkan, membandingkan, serta menginterpretasikan berbagai informasi dari literatur yang telah dikumpulkan. Proses analisis data meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dijelaskan oleh Matthew B. et al. (2014). Melalui proses tersebut, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika permukiman kumuh di Kota Palembang dalam perspektif sosial dan ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Permukiman Kumuh

Pusat Penelitian dan Pengembangan (2011) menjelaskan bahwa permukiman kumuh merupakan gambaran sebuah kawasan perumahan yang tidak beraturan, kurangnya pelayanan infrastruktur dengan populasi yang dilayani sehingga berdampak pada kondisi dari kualitas fisik serta lingkungan perumahan yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, serta kemudahan (Persada & Suroso, 2019). Data yang diperoleh dari Keputusan Walikota

Palembang Nomor 325/KPTS/DPRKP/2020 Tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Palembang diketahui bahwa kawasan permukiman kumuh di Kota Palembang tersebar seluas 1092,309 Ha yang mana ini merupakan cakupan luas yang cukup besar untuk sebuah ibukota provinsi yang juga merupakan salah satu pusat perekonomian yang ada di kawasan Sumatera Selatan. Salah satu daerah yang termasuk kedalam kawasan permukiman kumuh adalah kawasan Kelurahan 26 Ilir.

Dari total keseluruhan luas kawasan kumuh yang ada di Kelurahan 26 Ilir, terdapat satu kawasan permukiman yang terletak di Jalan Cempako Dalam Kelurahan 26 Ilir atau yang biasa dikenal masyarakat dengan kawasan Cempako Warna-Warni tepatnya di Gang Berdikari RT.17 RW.05 yang kini telah menjadi Kampung Sayur dengan kawasan yang asri dan indah. Dulunya kawasan ini merupakan kawasan permukiman kumuh dengan kondisi jalan yang sempit, rumah yang berhimpitan dan penuh dengan sampah rumah tangga. Berbagai sampah berserakan di permukiman ini mulai dari sampah plastik, perabotan rumah yang telah rusak serta jenis sampah-sampah lainnya yang bertumpukan sehingga menimbulkan aroma yang tidak sedap, bahkan tidak jarang pada saat musim hujan melanda Kota Palembang kawasan ini menjadi langganan banjir yang membuat sampah-sampah menjadi berserakan.

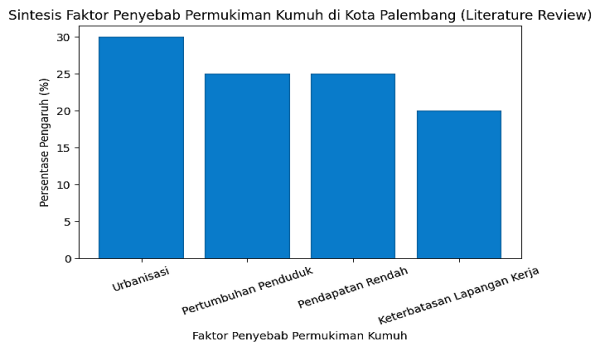
Faktor Penyebab Permukiman Kumuh

Pertumbuhan penduduk yang begitu pesat yang biasanya tidak disertai dengan antisipasi daya dukung yang baik seperti penyediaan sarana dan prasarana yang

dibutuhkan oleh kalangan masyarakat, tingginya pertumbuhan penduduk di kota biasanya terjadi karena adanya dua hal, yang pertama terjadi pertumbuhan penduduk secara alami dan yang kedua terjadi akibat adanya urbanisasi akibat tingginya jumlah migrasi (Sukmaniar, dkk 2018) dalam (Taufik et al., 2019). Urbanisasi merupakan proses perpindahan penduduk dari desa ke kota yang di dorong oleh keinginan untuk memperoleh kesempatan kerja, pendidikan, serta kualitas hidup yang lebih baik. Namun pada kenyataannya banyak dari mereka yang tidak mendapatkan apa yang sesuai dengan keinginan mereka, sehingga banyak dari mereka yang akhirnya bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang tidak menentu seperti, pedangang kaki lima, buruh harian atau pekerja jasa informal. Selain itu urbanisasi juga berdampak pada ketimpangan ekonomi masyarakat, dalam permukiman kumuh terdapat perbedaan dalam tingkat pendapatan, akses pekerjaan yang layak. Dari adanya beberapa faktor tersebut menyebabkan sebagian masyarakat berpendapatan rendah kesulitan dalam mendapatkan akses hunian yang layak sehingga mereka cenderung menepati lahan – lahan yang tidak direncanakan untuk dijadikan permukiman, seperti pada bantaran sungai serta lahan kosong yang tidak memiliki izin pembangunan. Selain itu kondisi ekonomi yang terbatas tersebut membuat masyarakat memilih tinggal di kawasan dengan biaya sewa serta biaya hidup yang relative rendah, meskipun lingkungan tersebut memiliki kualitas hunian yang bisa dibilang tidak layak.

Faktor Penyebab Permukiman Kumuh

Gambar berikut menunjukkan sintesis faktor faktor utama yang mempengaruhi terbentuknya permukiman kumuh berdasarkan kajian literatur yang digunakan dalam penelitian ini.



Gambar 1. Faktor penyebab permukiman kumuh di kota Palembang

Berdasarkan gambar 1 dapat dilihat bahwa urbanisasi menjadi faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi terbentuknya permukiman kumuh, diikuti oleh pertumbuhan penduduk dan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat. Sementara itu, keterbatasan lapangan pekerjaan juga memberikan kontribusi terhadap meningkatnya jumlah masyarakat yang bekerja di sektor informal dengan penghasilan yang rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan permukiman kumuh tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik lingkungan, tetapi juga berkaitan erat dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penanganan permukiman kumuh perlu dilakukan secara terpadu melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyediaan lapangan pekerjaan, serta perbaikan infrastruktur permukiman.

Dampak Permukiman Kumuh

Dampak dari adanya permukiman kumuh dapat dikategorikan sebagai berikut

yaitu pertama dampak fisik kepada lingkungan atau alam yaitu lingkungan menjadi rusak, contohnya adalah banyaknya penduduk di permukiman kumuh yang membuang sampah sembarangan sehingga lingkungan menjadi rusak. Selain itu, sampah yang banyak dibuang tersebut mengakibatkan banyaknya bermunculan berbagai penyakit yang dapat menyerang masyarakat dan akibat buruknya penyakit tersebut dapat mengakibatkan kematian. Tempat pembuangan sampah yang tidak terpelihara dan banyak penduduk yang tidak memiliki tong sampah mengakibatkan banyaknya timbulan sampah yang ada di permukiman kumuh (Crysta dan Budisusanto, 2017).

Adapun dampak sosial yang dapat hadir di permukiman kumuh yaitu pertama kemiskinan, hal ini dapat terjadi karena kemampuan atau skill tidak dimiliki masyarakat sehingga mereka berada pada garis kemiskinan. Selain itu adalah rendahnya pendidikan, dapat diartikan bahwa ekonomi yang rendah mengakibatkan banyak penduduk yang tidak bersekolah. Pendidikan penduduk di permukiman kumuh didominasi mereka yang memiliki pendidikan rendah, hal itu berdampak pada pola pikir mereka yang tidak peduli akan kebersihan lingkungan, selain itu juga pendidikan yang rendah tersebut dapat mempengaruhi jenis pekerjaan dan pendapatan penduduk di permukiman kumuh (Wimardana dan Setiawan, 2016). Kondisi pekerjaan penduduk di permukiman kumuh didominasi mereka yang bekerja pada sektor informal seperti buruh, hal tersebut terjadi karena pendidikan dan skill yang mereka miliki rendah (Krisnajayanti dan

Zain, 2014). Permukiman kumuh di Kota Palembang, seperti kawasan 3-4 Ulu, 5 Ilir, dan Kertapati, menunjukkan prevalensi tinggi terhadap penyakit menular seperti ISPA, diare, dan penyakit kulit. jangka panjang, anak-anak yang mengalami stunting berisiko memiliki perkembangan kognitif dan motorik yang terganggu, serta produktivitas yang rendah di masa depan (Kemenkes RI, 2020).

Anemia pada ibu hamil di daerah kumuh memperlihatkan lemahnya sistem pelayanan kesehatan dasar, termasuk keterlambatan pemeriksaan kehamilan, kurangnya distribusi tablet tambah darah, dan asupan makanan bergizi rendah. Selain itu, praktik pantang makan dan pola makan monoton yang berbasis karbohidrat juga memperparah kondisi ini (Lestari et al., 2019). Intervensi gizi berbasis komunitas dan pemberdayaan kader posyandu menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan akses ibu terhadap sumber zat besi dan layanan ANC. Lingkungan permukiman dikatakan kumuh bisa digambarkan dari kondisi lingkungan permukimannya, seperti halnya kondisi bangunan yang berdesakan, luas rumah tidak sebanding dengan jumlah penghuni yang ada di dalamnya, lingkungan dan tata permukimannya yang tidak teratur (Damisi, Kumurur, & Sela, 2014). Jarak antar bangunan yang sangat dekat antar satu bangunan dengan bangunan yang lainnya juga menjadi penyebab kekumuhan suatu wilayah di perkotaan, dikarenakan lingkungan yang padat membuat lingkungan menjadi padat dan tidak nyaman (Lantang, Mononimbar, Sangkertadi, & Suryono, 2013).

Tidak adanya celah antar bangunan satu dengan bangunan yang lain mengakibatkan tempat tersebut terlihat kumuh, adapun ciri-ciri suatu wilayah dikatakan kumuh adalah; kondisi lingkungan yang kotor, tidak adanya saluran drainase yang baik, tidak adanya tempat pembuangan sampah, mayoritas dari masyarakat sebagai pekerja informal dengan pendapatan yang relatif rendah, kurangnya fasilitas sanitasi (wc, atau kesediaan air bersih), apabila di suatu permukiman terdapat salah satu bahkan lebih dari ciri-ciri diatas maka lingkungan tersebut masuk dalam kategori wilayah kumuh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari kajian literatur yang telah dilakukan, permukiman kumuh kota di Palembang merupakan fenomena perkotaan yang muncul sebagai akibat dinamika sosial dan ekonomi masyarakat. Kawasan permukiman kumuh umumnya di tandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi, kondisi lingkungan yang kurang layak huni, serta keterbatasan akses terhadap fasilitas dasar seperti sanitasi, air bersih, dan infrastruktur lingkungan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terbentuknya permukiman kumuh dipengaruhi oleh beberapa factor utama, yaitu tingginya pertumbuhan penduduk, meningkatnya arus urbanisasi, keterbatasan lapangan kerja, serta rendahnya tingkat pendapatan masyarakat. Selain faktor ekonomi, kondisi sosial masyarakat juga turut mempengaruhi perkembangan kawasan permukiman kumuh, terutama terkait dengan keterbatasan akses

terhadap sumber daya dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Program Studi Sosiologi Universitas Sriwijaya yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan penelitian ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada dosen pengampu mata kuliah serta semua pihak yang telah memberikan bantuan, arahan, dan masukan selama proses pengumpulan data, penulisan, hingga penyusunan manuskrip artikel ini sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Nuradinda, O. M., Zulkifli, H., & Mohadi, R. (2020). The role of housewives on sanitation management in slum area, Palembang. *Indonesian Journal of Environmental Management and Sustainability*.
- Rahman, S., & Irwansyah. (2025). Mapping the location and infrastructure of slum settlement areas in Palembang City using mobile-based GIS. *Jurnal Teknologi Informatika dan Komputer MH. Thamrin*, 11(1).
<https://doi.org/10.37012/jtik.v11i1.2521>
- Salim, A., Irriani, S. N., & Hapsari, Y. R. (2022). Implementasi pendekatan symbio-city pada pembangunan inklusif: Studi kasus slums upgrading di Kota Yogyakarta. *Bappenas Working Papers*, 5(2), 241–269.
- Sari, D. N. (2020). Penerapan smart environment pada pemukiman kumuh di bantaran Kali Code Kota Yogyakarta. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(1), 34–42.
<https://doi.org/10.31947/jgov.v13i1.8854>
- Sukmaniar, S., Listyaningsih, U., & Muhidin, S. (2026). Kernel density and spatial modeling of informal settlement

concentration: Methodology and findings from Palembang, Indonesia. *Advance Sustainable Science, Engineering and Technology (ASSET)*, 8(1).

<https://doi.org/10.26877/asset.v8i1.2980>

- Taufik, M., Sukmaniar, S., Saputra, W., & Putri, M. K. (2019). Perubahan kondisi sosial budaya masyarakat permukiman kumuh akibat urbanisasi di Kota Palembang. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 7(2), 12–25.
<https://doi.org/10.31289/publika.v7i2.2969>

- Tjiptoherijanto, P. (1999). Urbanisasi dan pengembangan kota di Indonesia. *Populasi*, 10(2), 57–72.